



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

BULETIN

# KONSTRUKSI

Edisi 2 Tahun 2019

SERTIFIKASI

# Tenaga Kerja Konstruksi

8  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/  
JASA (UKPBJ) DAN UNIT TEKNIS  
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI  
KEMENTERIAN PUPR

18  
PETA PROSES  
BISNIS ORGANISASI

ISSN 1907-0136



9 771907 013646



28

### April Mop

*Familiar dengan budaya April Mop? Singkatnya, budaya dari barat ini dikenal juga dengan sebutan April Fools' Day, diperingati setiap tanggal 1 April setiap tahun dengan memperbolehkan orang memberi lelucon kepada orang lain atau berbohong tanpa dianggap bersalah.*

### berita utama

- 04** Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Kompetensi dan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat
- 08** Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Unit Teknis Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian PUPR

### berita terkini

- 10** Siapkan tenaga Kerja Konstruksi melalui pendidikan Vokasi

### berita terkini

- 16** Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Dalam Membangun Peradaban Indonesia: Perluasan Pengarusutamaan Gender Dan Peran Generasi Muda
- 18** Peta Proses Bisnis Organisasi
- 22** Penyetaraan Kompetensi Tenaga Ahli Sektor Konstruksi (Profesi)
- 24** Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Proyek Konstruksi Menggunakan Model Kontrak Cost Plus Fee



### soft news

- 26** Pemberdayaan Dalam Rangka Mendorong Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Melalui Program Bantuan Perumahan Swadaya

### Q & A

- 30** Games

### liputan khusus

- 12** Akselerasi Kompetensi Sdm Operator Alat Berat Dengan Simulator
- 14** Forum Konsolidasi Rantai Pasok Sumber Daya MPK Tahun 2019



### DEWAN REDAKSI

**Pembina/Pelindung:** Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; Direktur Pengadaan Barang dan Jasa; Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Dirketur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** M. Aldenny. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi. **Redaksi Sekretariat:** Galuh Shinta Dewi, Teni Agustina, ST Ngafiyah, Siti Afrida, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika.

### ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

## SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

**S**alam sejahtera kepada pembaca setia Buletin Ditjen Bina Konstruksi, terima kasih tak terhingga diucapkan oleh Tim Redaksi kepada para pembaca yang selalu menanti kehadiran Buletin Ditjen Bina Konstruksi di setiap edisinya. Pada edisi 2 tahun 2019 ini, Tim Redaksi kembali menghadirkan berita-berita dan info-info terbaru seputar dunia konstruksi.

Salah satu berita aktual adalah yang terkait upaya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR yang terus meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi di Indonesia. Sebagaimana diketahui, di tahun 2019 ini Ditjen Bina Konstruksi memiliki target untuk mencetak 512.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan sertifikasi yang dilakukan di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia seperti Aceh, Medan, dan Purworejo.

Tahun 2019 sebagai tahun Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR juga terus berupaya meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi baik terampil maupun ahli melalui jalur Vokasi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang telah di tandatangani oleh Sekjen Kementerian PUPR dengan Sekjen Kemenristekdikti beberapa waktu lalu.

Simak juga artikel yang berisi pembahasan pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) Ditjen Bina Konstruksi sebagai unit kerja baru di Ditjen Bina Konstruksi. Tidak ketinggalan Artikel tentang simulator alat berat dan forum konsolidasi rantai pasok sumber daya material dan peralatan tahun 2019 yang dapat menjadi bahan bacaan menarik pembaca setia pada edisi kali ini. Selain itu, kerangka pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat dalam membangun peradaban Indonesia dan peta proses bisnis organisasi juga sayang dilewatkan.

Ikuti dan isi kuisisioner dan *games* yang Tim Redaksi siapkan, dapatkan hadiah menarik bagi para pengirim yang mengirimkan jawaban dengan cara: mengunjungi *website* <http://bit.ly/KuesionerBuletinDJBK> kemudian *scan* logo *barcode* yang tersedia. Semoga suguhan artikel dalam Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi dapat membantu memberikan informasi seputar dunia konstruksi khususnya pada sektor pembinaan konstruksi di Indonesia. Salam Bina Konstruksi...!

# SERTIFIKAT ELEKTRONIK TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA

JAKARTA, 12 MARET 2019

## KEMENTERIAN PUPR TERUS TINGKATKAN KOMPETENSI DAN JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT

SEJAK TAHUN 2015 sampai dengan 2018, jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi adalah sebesar 192 ribu tenaga kerja dengan rata-rata setiap tahun menghasilkan 50 ribu tenaga kerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selaku pembina Jasa Konstruksi Indonesia terus berupaya memenuhi target peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi hingga 10 kali lipat, sebagaimana yang disampaikan Presiden RI saat memberikan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di JIExpo Kemayoran, Oktober 2018 lalu. Hal tersebut juga sesuai amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 Tahun 2017.

Untuk mengejar target tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong Pengembangan SDM Konstruksi, diantaranya melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Hukum dan HAM,

Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian BUMN untuk melaksanakan revitalisasi pendidikan kejuruan dan vokasi dengan program *link and match*.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS,2018) tenaga kerja konstruksi saat ini berjumlah 8,3 juta, sedangkan tenaga kerja bersertifikat hanya 7,4% saja, atau sebesar 616.000 orang dengan rincian : 419.000 orang tenaga kerja terampil dan 197.000 orang tenaga kerja ahli (data LPJKN, Januari 2019). Pada tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan 212.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat melalui program pelatihan dan sertifikasi reguler, maupun jalur vokasional (sebanyak 16.000 orang) atas anggaran APBN, dan 300.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat melalui LPJK dan sumber dana lainnya. Dengan demikian tahun ini Kementerian PUPR menargetkan 512.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

**Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Jakarta**  
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di dampingi

oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, menyerahkan sertifikat kompetensi kerja kepada perwakilan dari 16.000 tenaga kerja konstruksi yang terdiri dari 13.900 peserta tenaga kerja terampil dan 2.100 tenaga kerja ahli bidang konstruksi dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, pada Selasa (12/03) di Istora Senayan Jakarta.

"Kita harus meningkatkan kualitas SDM konstruksi melalui pelatihan, kalau perlu ada yang di kirim ke luar negeri. Dengan demikian SDM kita menjadi handal, unggul, berani berkompetisi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tahun depan (Program Sertifikasi) akan kita lakukan lebih besar," kata Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dunia konstruksi terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karenanya kecepatan perubahan teknologi harus bisa dikenali, dipelajari dan dimengerti oleh SDM konstruksi Indonesia. "Saya sangat menyambut baik program sertifikasi SDM konstruksi Indonesia. Ini penting karena memberikan keunggulan, jaminan profesionalisme, mutu, dan

akuntabilitas disetiap pekerjaan yang kita miliki," ujar Presiden Jokowi.

**Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Aceh**

SDM atau Tenaga kerja yang bersertifikat diharapkan akan mendorong produktivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur. Tuntutan tersebut tentunya harus sejalan dengan jaminan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja konstruksi bersertifikat. "Pengaturan terkait upah bagi tenaga kerja konstruksi, saya minta dapat segera disiapkan dengan baik oleh Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja", demikian disampaikan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat membuka secara resmi Kegiatan Uji Sertifikasi kepada Tenaga Kerja Konstruksi di Banda Aceh, Senin (11/3) di Banda Aceh.

Saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi di Provinsi Aceh sebesar 166.824 orang (2,0% dari tenaga kerja konstruksi nasional) dimana hanya sekitar 12,1% yang bersertifikat atau hanya sekitar 20.129 orang. Sementara itu anggaran infrastruktur Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik di Provinsi Aceh sejak tahun 2015-2018 rata-rata sebesar Rp1,65 T. Nilai anggaran infrastruktur pembangunan fisik tersebut menyerap





tenaga kerja konstruksi sebanyak 23.100 orang tiap tahunnya. Sehingga dapat diketahui masih terdapat gap sebanyak 12,8% tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Provinsi Aceh.

Kesadaran sertifikasi tenaga kerja konstruksi seharusnya menjadi komitmen semua pemangku kepentingan, karena pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang, dimana Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, sedangkan untuk pelatihan tenaga terampil konstruksi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Sumatera Utara**

Jika selama ini Pemerintah terkesan menekankan pembangunan infrastruktur, sejak 2018 hingga 2019 ini pemerintah juga fokus kepada peningkatan kualitas SDM konstruksi salah satunya melalui Sertifikat. Program sertifikasi ini adalah upaya nyata Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Presiden RI sendiri menyatakan bahwa program sertifikasi SDM konstruksi Indonesia akan memberikan keunggulan, jaminan profesionalisme, mutu, dan akuntabilitas disetiap pekerjaan yang kita miliki. Terutama tentunya pekerjaan di sektor konstruksi, demikian disampaikan Menteri PUPR yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanudin saat

membuka secara resmi Kegiatan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Sumatera Utara, Senin (18/3) di Medan. Saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 353.259 orang (4,26% dari tenaga kerja konstruksi nasional) dimana hanya sekitar 3,32% yang bersertifikat atau hanya sekitar 11.734 orang (data LPJK per 31 Desember 2018). Sementara itu anggaran infrastruktur Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik di Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2015-2018 rata-rata sebesar Rp 3,11 T. Nilai anggaran infrastruktur pembangunan fisik tersebut menyerap tenaga kerja konstruksi sebanyak 43.505 orang tiap tahunnya. Sehingga dapat diketahui bahwa kita masih memiliki gap sebanyak 73,03% tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Provinsi Sumatera Utara.

#### **Sertifikasi Tenaga Kerja Ahli Konstruksi di Jakarta**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, melakukan penyerahan sertifikat kompetensi kepada 3.000 tenaga kerja Ahli Muda Konstruksi se-Indonesia. Penyerahan sertifikat diberikan kepada enam orang perwakilan, dalam rangka kegiatan Pekan SDM Ahli Konstruksi Indonesia, IndoBuildTech Expo 2019 dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Intakindo 2019. Kegiatan diadakan tanggal 20 - 24 Maret bertempat di ICE-BSD, Tangerang-Banten.

Tenaga kerja ini merupakan potensial personil yang bisa digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Mereka adalah tenaga kerja angkatan muda baik yang baru lulus (*fresh graduate*) ataupun memiliki pengalaman kerja kurang dari 5 tahun. Bertambahnya tenaga kerja Ahli Muda dan telah disertifikasi ini akan memberikan nilai tambah bagi penyediaan tenaga kerja Ahli Bidang Konstruksi yang jumlahnya baru 32% dari total 616.081 orang tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi.

Data BPS menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaan konstruksi adalah 8,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, 20% nya adalah tenaga ahli. Asumsinya adalah, dari jumlah tersebut dibutuhkan 1,6 juta orang tenaga ahli. Baik itu ahli



muda, madya dan utama. "Potensi ruang kerja yang besar ini dapat menjadi peluang bagi para *engineer* muda untuk berkarya di bidang konstruksi," ujar Darmin.

Sebagai gambaran, data LPJKN per 31 Desember 2018, jumlah tenaga kerja Ahli di Pulau Sumatera sejumlah 25.186, Jawa sebanyak 83.679 orang, Kalimantan berjumlah 11.946 orang, di Sulawesi terdapat 15.519 orang, Bali-Nusa ada 7.318 orang dan di Maluku-Papua terdapat 6.876 orang. "Jumlah ini masih sangat jauh dari kebutuhan tenaga ahli dari setiap pekerjaan konstruksi," jelas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

### Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Purworejo Jawa Tengah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyerahkan sertifikat kepada 5.000 tenaga kerja konstruksi di wilayah Kota Purworejo Jawa Tengah, Kamis (04/04) di Alun-alun Kota Purworejo. Program ini merupakan tindak lanjut dari program percepatan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi yang ditetapkan pada Oktober 2018 serta pada 12 Maret 2019 lalu oleh Presiden RI Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga melihat lomba uji ketangkasan tenaga kerja konstruksi yang diberi nama "*Construction warrior*". Lomba ketangkasan tersebut dimenangkan oleh perwakilan tukang



dari Banjarnegara sebagai juara pertama, diikuti Purworejo sebagai juara kedua dan Wonosobo pada peringkat ketiga.

"Saya harapkan ketangkasan dalam *construction warrior* ini dapat diterapkan pada kegiatan sehari-hari dalam membangun infrastruktur. Saya yakin secara teknis tenaga konstruksi Indonesia sudah ahli, namun kita lemah dalam penerapan metode kerja terutama kerapian kerja, kebersihan di samping kompetensinya," pesan Menteri Basuki.

Diperkirakan pada tahun 2040 Indonesia akan memiliki 195 juta penduduk usia produktif; dimana 60 persen penduduk usia muda di tahun 2045 yang harus dikelola dengan baik agar menjadi bonus demografi demi terwujudnya Indonesia Emas pada 100

tahun kemerdekaan. "Karena itu bonus demografi tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak justru menjadi penghambat kemajuan, serta menjadi dasar bagi Pemerintah menetapkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional sejak 2019", ungkap Basuki.

Hal tersebut menjadi pilihan logis melihat jumlah tenaga kerja konstruksi saat ini berjumlah 8,3 juta (data BPS, 2018), sedangkan tenaga kerja bersertifikat baru 7,6% saja, yaitu sebesar 628.500 orang. Dengan demikian percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi menjadi salah satu agenda utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kalau Saudara yang sudah bersertifikat masih kesulitan atau dipersulit dalam mencari kerja, tolong laporkan ke LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), LPJK nanti akan melaporkan lebih lanjut ke Kementerian PUPR," ujarnya.

Untuk mempermudah identifikasi tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat, Kementerian PUPR bersama dengan LPJK juga telah mengembangkan aplikasi uji sertifikasi digital. Melalui aplikasi tersebut setiap tenaga kerja yang sudah bersertifikat dapat terlihat datanya hanya dengan menggunakan sistem *barcode*. Menteri Basuki berkesempatan menguji aplikasi tersebut kepada sejumlah pekerja yang hadir dalam acara tersebut.



# UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (UPTPBJ) DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Oleh: Decki Rahadian F. M.Ec.Dev, M.Sc;  
Harry Setyawan, ST, M.Sc;  
Marita Dewi Astuty, ST, MT.



PADA TAHUN 2018 Kementerian PUPR telah melakukan tender/seleksi dengan total jumlah paket sebanyak 10.259 paket pengadaan dengan total sekitar Rp 80 Triliun yang dilelang oleh 2.483 anggota Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan. Anggota Pokja tersebut merupakan ASN perwakilan dari masing-masing Satuan Kerja (Satker) dan Unit Organisasi yang belum bekerja secara penuh waktu sebagai Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Hal ini merupakan suatu hambatan karena dapat menyebabkan Pokja kurang fokus dalam melakukan Pengelolaan PBJ yang dianggap sebagai pekerjaan tambahan. Pokja dengan status ad hoc ini juga mempersulit koordinasi, dokumentasi dan pengawasan pelaksanaan PBJ serta dapat membuat celah bagi penyimpangan dan persekongkolan di dalam pelaksanaan PBJ.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan PBJ, Kementerian PUPR telah menyusun

sembilan strategi dimana langkah pertama dalam strategi tersebut yaitu melalui reformasi organisasi PBJ di Kementerian PUPR. Reformasi organisasi PBJ tersebut juga untuk menjawab Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang mengamatkan pembentukan UKPBJ pada masing K/L/PD (menteri/lembaga/perangkat daerah). Pembentukan UKPBJ ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 yang menetapkan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) di setiap Provinsi.

Dengan dibentuknya organisasi pengelola PBJ yang baru ini, maka diperlukan suatu pemindahtanganan proses PBJ yang sedang berlangsung dari organisasi lama kepada organisasi baru agar pelaksanaan PBJ tetap dapat berjalan

secara berkesinambungan. Oleh karena ini, Kementerian PUPR pada tanggal 20 Maret 2019 telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan mengambil tema "Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur di Kementerian PUPR". Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk melakukan serah terima dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang meliputi tiga aspek yaitu:

1. Paket pekerjaan yang belum dilakukan tender/seleksi;
2. Paket pekerjaan yang sedang dalam proses tender/seleksi beserta personel Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan; dan
3. Akses untuk mengoperasikan sistem informasi pengadaan barang/jasa.

Dalam kegiatan Rapat koordinasi ini,

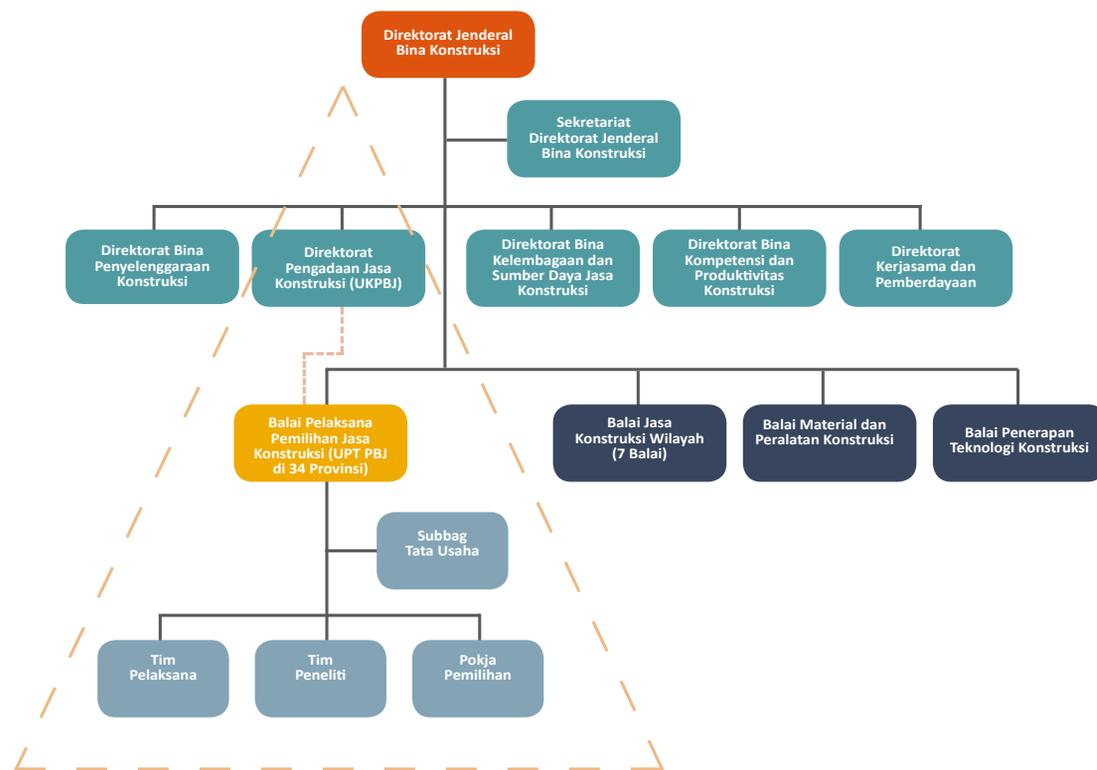
Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga memberikan arahan bahwa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi merupakan wajah Kementerian PUPR. Oleh sebab itu, integritas dan profesionalisme harus menjadi dasar dalam bekerja dan melaksanakan setiap tugas. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga menekankan kepada seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar ikut berkomitmen menghindari intervensi dalam proses pemilihan.

Organisasi UKPBJ dan UPTPBJ yang independen ini diharapkan dapat menjadi Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) PBJ yang memiliki prinsip: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta mematuhi etika pengadaan dalam melakukan pengelolaan PBJ di Kementerian PUPR. Unit ini juga

diharapkan dapat secara mandiri dan terintegrasi melaksanakan pengelolaan PBJ dengan profesional yang didukung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang PBJ, disiplin dan integritas yang tinggi.

Pada akhirnya pengelolaan dan pengawasan kepada UKPBJ dan UPTPBJ yang independen ini menjadi tugas bersama agar dalam pelaksanaan kedepannya, UKPBJ dan UPTPBJ ini dapat diimplementasikan sesuai dengan filosofi pembentukannya menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (*Center of Excellence - CoE*) yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga mendorong penciptaan nilai tambah dan manfaat (*value for Money*) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR.

### Kelembagaan UKPBJ dan UPTPBJ Kementerian PUPR



# Siapkan Tenaga Kerja Konstruksi **MELALUI PENDIDIKAN VOKASI**

Oleh: Catherine Sihombing



**Pelatihan**  
**26.000 Orang**



**Sertifikasi**  
**170.000 orang**



**Pendidikan Vokasi**  
**16.000 orang**

UNTUK MENJADI negara yang besar, dibutuhkan infrastruktur yang layak dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan kompeten. Komitmen ini menjadi bagian dari Pemerintahan Kabinet Kerja (Jokowi-Jusuf Kalla), untuk mewujudkan Indonesia sebagai mercusuar dunia. Guna menyiapkan tenaga kerja yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri, maka program *Link and Match* menjadi salah satu solusi.

Kebutuhan pembangunan infrastruktur membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit. Salah satu cara untuk dapat menyiapkan tenaga kerja siap pakai adalah

dengan mengembangkan pola pendidikan vokasional. Yakni pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan, agar mampu, sanggup, terampil dalam menjalankan kehidupan (Fani,Faisal; jurnal.unair.ac.id). Dengan kata lain, sebuah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang tujuannya mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global ([simak.ui.ac.id/deskripsi-vokasi.html](http://simak.ui.ac.id/deskripsi-vokasi.html)).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bekerjasama untuk menyiapkan anak-anak didik agar bisa bersaing yaitu melalui program pepaduan dunia pendidikan dengan dunia jasa konstruksi. Implementasi program vokasi dikembangkan melalui program *link and match*. Program ini berfokus pada penyesuaian kurikulum sekolah dan pemagangan agar sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DuDi) serta siswa / mahasiswa setelah lulus tidak hanya mendapatkan ijazah akademis tetapi juga sertifikat kompetensi kerja. Diharapkan setelah siswa / mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi kerja mereka dapat lebih mudah untuk memasuki dunia kerja.

Menurut data BPS per bulan Agustus 2018, menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi oleh tenaga kerja lulusan SMK, yaitu sebesar 11,24 %. Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 4,80%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,95%, Diploma III (D3) sebesar 6,02%, dan universitas 5,89%. Rendahnya serapan tenaga kerja lulusan SMK tersebut, disebabkan oleh adanya kesenjangan kompetensi antara lulusan lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Kualitas lulusan lembaga pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi kebutuhan dunia kerja ini menjadi permasalahan dan merupakan tugas bersama baik untuk pemerintah, dunia pendidikan maupun dunia industri yang harus segera diselesaikan padahal pendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan yang dikhususkan pada penguasaan keterampilan dan bertujuan untuk menghasilkan lulusan tenaga kerja terampil yang siap kerja. Sesuai dengan amanat UU Pendidikan nomor 12 tahun 2012. Setiap lulusan dituntut agar dapat berprofesi sesuai dengan keahliannya setelah melalui masa pendidikan. Pada kenyataannya, sejak UU ini diluncurkan masih banyak siswa/mahasiswa yang kesulitan untuk memiliki kemampuan kerja apalagi keprofesian. Sehingga tidak heran banyak siswa/mahasiswa yang setelah lulus menjadi pengangguran.

Seiring dengan telah terbitnya UU No. 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah mewajibkan kepada setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dan untuk Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki

Sertifikat Kompetensi Kerja. Hal ini menjadi landasan bagi Kementerian PUPR berupaya melakukan sinergi DuDi melalui *link and match*.

Melalui *link and match*, Kementerian PUPR berkomitmen untuk mendukung dunia pendidikan melalui dukungan penyesuaian kurikulum, peningkatan kapasitas guru, pengembangan pola pemagangan guru dan siswa/ mahasiswa, instruktur tamu dari praktisi, dan sertifikasi. Upaya ini, dikerjakan bersama dan diikat dalam Nota Kesepahaman tentang peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang konstruksi antara kementerian PUPR dan Kementerian Ristek Dikti yang ditandatangani oleh Sekjen PUPR Anita Firmanti dan Sekjen Kemenristekdikti Ainun Na'im, di Bandung (8/4/2019).

Pada nota kesepahaman tersebut, kedua belah pihak menyepakati akan menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten melalui jalur pendidikan vokasi dan akademik, penyediaan sarana dan prasarana pendukung termasuk fasilitasi program pemagangan dan KKN tematik bidang konstruksi serta penerapan dan pengembangan alih teknologi bidang konstruksi.

Terkait program *link and match* dan arahan Presiden RI, Kementerian Ristek Dikti telah mengeluarkan Keputusan Menteri Ristekdikti tentang magang industri dan pengakuan SKS magang industri pada tanggal 5 April 2019. Kepmen ini melegalkan proses pemagangan siswa di industri yang dihargai dalam bentuk SKS yang terpadu dalam kurikulum. Kementerian PUPR memberikan dukungan dalam penyiapan akses yang mempermudah bagi siswa / mahasiswa yang memerlukan tempat magang dan menyiapkan skema pemagangan yang dapat memenuhi harapan badan usaha agar siswa / mahasiswa yang datang magang di tempat mereka tidak hanya sekedar datang namun dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan berhasil memperoleh kompetensi yang ingin dicapai. Sehingga saat lulus diperoleh pengalaman yang cukup untuk nantinya pada saat mereka lulus, bermodalakan ijazah, sertifikat kompetensi dan pengalaman kerja nyata di bidangnya dapat langsung memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya pula.

Selain itu, Kementerian PUPR juga memberikan dukungan dalam penyiapan dosen untuk politeknik sebanyak 1500 orang. Kementerian PUPR akan menyeleksi praktisi-praktisi yang berpengalaman di bidangnya untuk dapat menjadi dosen di politeknik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di politeknik.



## AKSELERASI KOMPETENSI SDM OPERATOR ALAT BERAT DENGAN SIMULATOR

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng  
Balai Material dan Peralatan Konstruksi

SEIRING PERTUMBUHAN pembangunan infrastruktur, penggunaan alat berat sebagai alat bantu pekerjaan infrastruktur pun turut bertambah. Hal ini, tentu saja, berdampak pada peningkatan kebutuhan SDM operator alat berat yang kompeten dan andal. Guna mewujudkan SDM operator yang andal dan kompeten, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR pun telah melakukan beragam pelatihan serta memfasilitasi sarana dan prasarana pendukungnya. Salah satunya adalah dengan menyediakan simulator alat berat sebagai alat bantu dalam pembelajaran operasional alat berat.

### Simulator Alat Berat

Pemanfaatan simulator alat berat merupakan sebuah metode pelatihan pengoperasian alat berat yang mulai banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan. Tak hanya untuk kebutuhan pelatihan, simulator alat berat juga kerap digunakan sebagai alat bantu dalam proses rekrutmen.

Begitu pun dengan Ditjen Bina Konstruksi, yang telah memanfaatkan simulator sebagai alat pendukung dalam program pelatihan di sejumlah balai. Adapun balai-balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi yang telah memiliki fasilitas simulator alat berat adalah Balai Material dan Peralatan Konstruksi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura.

Penggunaan simulator dalam pelatihan akan membantu para calon operator dalam beradaptasi serta mengenali jenis dan fungsi komponen, panel kontrol, maupun tuas kendali alat berat. Selain itu, dengan simulator, calon operator bisa berlatih manuver gerakan, langkah, serta urutan kerja dari alat berat yang dioperasikannya.

Penggunaan simulator alat berat juga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan operasi dan kerusakan alat. Dari sisi efisiensi, pemanfaatan simulator dapat mengurangi biaya sewa peralatan dan penggunaan bahan bakar sehingga biaya pelatihan menjadi lebih efisien. Proses simulasi pun dapat direkam dan memberikan data pelatihan secara lengkap.

Hal ini akan membantu proses evaluasi terhadap kesalahan operasi yang dilakukan. Secara garis besar, pemanfaatan simulator dapat menjadi upaya akselerasi dalam mencetak SDM operator alat berat yang andal, kompeten, dan profesional.

**Pembelajaran Simulator**

Dalam pelatihan, penggunaan simulator merupakan tahapan bagi calon operator untuk beradaptasi, sebelum calon operator praktik dengan alat berat yang sesungguhnya. Pembelajaran dengan simulator ini diberikan sebanyak 8 jam pelajaran untuk setiap calon operator. Adapun tahapan pelatihan dapat dilihat dalam diagram.

Agar pembelajaran efektif, modul-modul simulator alat berat disesuaikan dengan materi pengoperasian alat berat yang sesungguhnya. Dengan demikian, calon operator benar-benar mengenal dan menguasai panel-panel kontrol maupun tuas kendali pada alat berat. Disamping itu, proses adaptasi dengan alat berat pun dapat berlangsung lebih cepat.

Namun yang perlu digarisbawahi dalam pemanfaatan simulator adalah simulator merupakan alat bantu pembelajaran, bukan substitusi dari alat berat yang sesungguhnya. Karena itu, seorang calon operator tetap harus berlatih mengoperasikan unit alat berat yang sesungguhnya di lapangan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan dalam pengoperasian alat berat dengan simulator alat berat.

**Tantangan Alat Berat**

Dalam mengoperasikan alat berat, operator akan dihadapkan pada tantangan dan tekanan yang tidak ditemukan saat mengoperasikan simulator. Dalam hal ini, pengoperasian alat berat di lapangan membutuhkan kondisi operator yang benar-benar siap secara fisik. Begitu pun dengan kondisi mental operator.

Operator harus memiliki rasa percaya diri dan keyakinan dalam mengoperasikan alat berat. Dengan

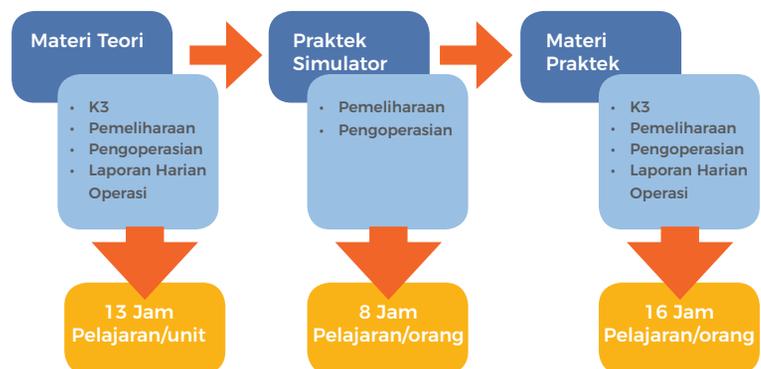


begitu, operator tidak akan gentar saat dihadapkan pada hambatan, seperti saat harus melintasi gundukan.

Ketika mengoperasikan alat berat, operator juga harus siap dengan berbagai kondisi lingkungan, kondisi tanah, kondisi lapangan, ataupun kondisi beban yang akan diangkat. Misalnya saja, mengoperasikan alat berat pada tanah lunak akan berbeda dengan di tanah keras, ataupun pada kondisi tanah yang miring akan berbeda dengan kondisi tanah yang datar.

Yang tak kalah penting adalah setiap operator harus menguasai, memahami, dan menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K3 wajib diterapkan di setiap aspek, baik

pemeliharaan maupun pengoperasian. Di antaranya, setiap operator harus memastikan Alat Pelindung Diri (APD) terpasang lengkap dan alat berat yang akan dioperasikan dalam kondisi aman. Dengan pelatihan yang mencakup aspek teori, praktik simulator, dan praktik langsung di lapangan, calon operator diharapkan dapat memenuhi standar minimal, baik dalam pemeliharaan maupun pengoperasian alat berat, berdasarkan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi. Hingga pada akhirnya, mampu mencetak SDM operator alat berat yang andal dan kompeten serta memenuhi kualifikasi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).





## FORUM KONSOLIDASI RANTAI PASOK SUMBER DAYA MPK TAHUN 2019

Oleh: Dr. Yolanda Indah Permatasari, S.E., M.M.  
Kepala Subdirektorat Material dan Peralatan Konstruksi

**RANTAI PASOK** sumber daya konstruksi, terutama sumber daya Material dan Peralatan Konstruksi (MPK), merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pembangunan sistem rantai pasok MPK sendiri membutuhkan ketersediaan data dan informasi terkait sumber daya MPK. Untuk itu, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi menggelar Forum Konsolidasi Rantai Pasok Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi Tahun 2019 pada 19 Maret 2019 lalu.

### Rantai Pasok MPK

Forum Konsolidasi yang diselenggarakan di Hotel Ambhara, Jakarta tersebut merupakan bentuk koordinasi dan kolaborasi Kementerian PUPR dengan para pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi terbaru mengenai kebutuhan dan ketersediaan MPK di lingkungan Kementerian PUPR pada tahun 2019.

Rantai pasok sumber daya MPK itu sendiri mencakup usaha pemasok bahan bangunan, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, serta usaha pemasok sumber daya manusia. Dengan pengelolaan rantai pasok (*supply chain management*) yang terintegrasi dan memadai, jasa konstruksi diharapkan dapat bertransformasi menjadi industri yang berdaya saing dalam era kompetisi global. Disamping itu, pengelolaan rantai pasok tersebut diharapkan pula dapat mendorong pencapaian target pembangunan infrastruktur di tahun 2019. Di tahun 2019, Kementerian PUPR melaksanakan 3.926 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur senilai Rp 32,61 triliun. Guna merealisasikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang telah ditetapkan, Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp110,73 triliun

dengan total belanja modal sebesar 68,39% atau sebesar Rp75,73 triliun.

Untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR pun telah melakukan proses lelang dini tahun anggaran 2019 pada November 2018 lalu. Setelah sebelumnya, tepatnya pada 16 Oktober 2018, Kementerian PUPR juga telah melaksanakan penandatanganan Pakta Komitmen Bersama mengenai Penyediaan Data dan Informasi MPK antara Ditjen Bina Konstruksi dengan 12 asosiasi terkait.

### Pemaparan MPK

Forum Konsolidasi yang dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng., dilaksanakan dalam tiga sesi. Pertama, sesi pemaparan oleh Unit Organisasi (Unor) Kementerian PUPR. Kedua, sesi pemaparan oleh asosiasi material aspal minyak, semen, beton pracetak dan prategang, baja, serta baja ringan. Sesi terakhir diisi dengan pemaparan oleh asosiasi material baja, peralatan konstruksi, dan akademisi.

Dalam kesempatan tersebut, Syarif menyampaikan bahwa data yang diperoleh dari pelaksanaan forum ini merupakan data *supply-demand* dari sumber daya MPK yang penting dan bermanfaat dalam menentukan kebijakan. Kebijakan tersebut diperlukan guna mengendalikan pasar dan menentukan kebijakan ekspor-impor sumber daya MPK. Lebih lanjut, Syarif mengatakan bahwa alat berat konstruksi yang telah teregistrasi saat ini hanya sekitar 28.000 buah dari sekitar 70.000—100.000 alat berat konstruksi yang beredar di Indonesia.

Pada agenda berikutnya, pemaparan Unor dimulai dengan Ditjen Bina Marga yang menyampaikan tentang program pembangunan infrastruktur

di lingkungan Bina Marga. Di tahun 2019, Ditjen Bina Marga mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp40,32 triliun. Berdasarkan pagu tersebut, Ditjen Bina Marga menyampaikan kebutuhan MPK dengan menggunakan asumsi pembangunan jalan (non tol). Selanjutnya, Ditjen Cipta Karya memaparkan tentang Kebijakan dan Strategi Permukiman Tahun 2020—2024. Dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang terfokus pada pemenuhan akses terhadap air minum dan sanitasi serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Untuk kebutuhan MPK, Ditjen Cipta Karya belum dapat menyampaikan estimasi kebutuhan secara rinci, melainkan hanya estimasi jenis sumber daya MPK secara umum.

Demikian pula dengan Ditjen Sumber Daya Air (SDA), yang belum dapat menyampaikan estimasi kebutuhan jenis sumber daya MPK secara rinci. Di tahun 2019, Ditjen SDA memperoleh pagu anggaran sebesar Rp39,726 triliun yang akan digunakan untuk Program Pembangunan Infrastruktur Bidang SDA. Di antaranya, pembangunan dan rehabilitasi irigasi seluas 42 ribu hektar, pembangunan 48 bendungan dan 104 buah embung, pembangunan pengaman pantai sepanjang 13,03 km, pembangunan pengendali banjir sepanjang 38,25 km dan pengendali lahar dan sedimen sebanyak 13 buah, serta pembangunan unit air baku berkapasitas 5 m<sup>3</sup>/detik.

Sementara itu, Ditjen Penyediaan Perumahan memaparkan Program Sejuta Rumah untuk mewujudkan percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Ditjen Penyediaan Perumahan pun telah menyampaikann estimasi kebutuhan sumber daya MPK berdasarkan jenis infrastruktur perumahan yang akan dibangun, yaitu Rumah Swadaya, Bantuan PSU, Rumah Khusus, Rumah Subsidi, dan Rumah Susun.

**Penyempurnaan**

Pada sesi berikutnya, sejumlah asosiasi yang berkesempatan untuk menyampaikan pemaparannya, antara lain PT Pertamina Petrochemical, Asosiasi Semen Indonesia (ASI), Asosiasi Perusahaan Pracetak



dan Prategang Indonesia (AP3I), *Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA)*, serta *Asosiasi Roll Former Indonesia*. Sedangkan di sesi ketiga, pemaparan disampaikan oleh Asosiasi Pengembang Aspal Buton 9ASPABI), Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia, dan Perkumpulan Industri Alat Besar Indonesia (HINABI).

Di penghujung kegiatan, disimpulkan bahwa data dan informasi secara detil tentang kebutuhan MPK Kementerian PUPR TA 2019 masih belum diperoleh. Karenanya, diperlukan sebuah payung hukum bagi Tim Pengelola SIMPK untuk menjamin bahwa data yang dibutuhkan bisa diberikan secara berkala setiap akhir tahun sebagai dasar perencanaan di tahun berikutnya. Untuk dapat memberikan informasi keseimbangan *supply-demand* yang akurat, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi akan senantiasa menyempurnakan data dan informasi tentang kebutuhan dan ketersediaan MPK. informasi ini, nantinya, diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan seluruh *stakeholder*. Nantinya, data yang selalu update akan disajikan pada Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) yang bisa diakses melalui laman web: [mpk.binakonstruksi.pu.go.id](http://mpk.binakonstruksi.pu.go.id).

Material	Satuan	Pembangunan Jalan (Tol)	Preservasi Jalan (Non Tol)	Pembangunan Jalan (Non Tol)
Agregat	Ton	12.967.347	3.319.660	3.319.660
Aspal	Ton	442.559	204.395	204.395
Beton	M <sup>3</sup>	4.420.234	10.220	10.220
Peralatan	Unit	6.534	19.663	19.663

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Marga pada Forum Konsolidasi Rantai Pasok Sumber Daya MPK Tahun Anggaran 2019



## Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Dalam Membangun Peradaban Indonesia: **PERLUASAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERAN GENERASI MUDA**

Oleh: Hasfarm Dian Purba

**PEMBANGUNAN DITUJUKAN** kepada masyarakat seharusnya melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan tersebut. Kecenderungan pembangunan dalam suatu negara tidak lagi berbasis pada penyediaan (*supply driven*) tetapi permintaan (*demand driven*) dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dalam hidupnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan pemberdayaan.

Menurut Alfitri (2011), paradigma pembangunan berbasis masyarakat merupakan suatu tahap paradigma pembangunan dimana pembangunan dipusatkan pada rakyat dan rakyat ikut serta dalam proses pembangunan tersebut guna mendorong prakarsa masyarakat yang berasal dari bawah. Indonesia sendiri telah mengadopsi

konsep pembangunan berbasis masyarakat sejak tahun 1993 hingga saat ini. Beberapa program pembangunan berbasis masyarakat yang telah berjalan ialah PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat), SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat), PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) secara swadaya, bank sampah, dan sebagainya. Dalam kurun waktu 25 tahun, berbagai program-program terkait pemberdayaan masyarakat tersebut terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Pembangunan berbasis masyarakat tidak lagi hanya bertumpu pada penyediaan infrastruktur fisik saja tetapi bagaimana lingkungan hidup masyarakat dapat memenuhi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat menjadi kerangka penting dalam menghadapi era baru pembangunan saat ini, dimana setiap negara diarahkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang bertumpu pada pilar-pilar keberlanjutan. Pada era baru ini, isu gender menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Diskriminasi gender dalam proses pembangunan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya program-program pembangunan berbasis masyarakat.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan di era baru ini juga dipengaruhi oleh peranan generasi muda yang sangat identik dengan inovasi dan teknologi. Saat ini, ada 1,8 miliar orang berusia antara 10-24 tahun dan mereka adalah generasi muda terbesar dalam sejarah. Generasi muda memiliki jaringan yang jauh lebih kuat dan besar jika dibandingkan dengan generasi tua. Oleh karena itu, pembangunan berbasis masyarakat sudah saatnya mengalami transformasi yang jauh lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, penekanan utama ialah pengarusutamaan gender dan peranan generasi muda yang akan menjadi kunci utama terwujudnya pilar-pilar keberlanjutan dalam pembangunan di Indonesia.

Merujuk pada kerangka pengembangan masyarakat yang berkelanjutan tersebut, maka salah satu modal yang digunakan untuk memobilisasi masyarakat ialah *human capital* atau modal sumber daya manusia. *Human capital* atau modal sumber daya manusia adalah pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan atribut lainnya yang diwujudkan dalam individu untuk memfasilitasi penciptaan jati diri individu, sosial, dan kesejahteraan ekonomi (OECD, 2001). Atribut lainnya yang termasuk dalam cakupan definisi modal ini ialah jenis kelamin atau gender. Kesenjangan gender dalam pembangunan manusia memiliki pengaruh yang sangat signifikan.

Perempuan dan generasi muda sebagai bagian dari modal sumber daya manusia (*human capital*) tidak lagi dapat diabaikan dalam konteks pembangunan. Pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa infrastruktur fisik dan pemberdayaan masyarakat, tetapi lebih jauh untuk mencapai keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam sebuah tataran kehidupan yang terus bertumbuh dan berkembang. Pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat sebagai wujud kolaborasi antara pembangunan dengan pengembangan masyarakat bertujuan untuk mencapai sebuah keseimbangan titik equilibrium yaitu pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

Konsep pengarusutamaan gender menjadi tolak ukur dalam menyusun setiap program-program yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar berbasis kemasyarakatan. Pendekatan partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat menandakan adanya hubungan kesetaraan dan kebersamaan antara gender dan kelompok. Keseimbangan dan kesetaraan gender menjadi pondasi yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Selain itu, kehadiran generasi muda dalam proses pembangunan akan membawa peradaban dunia yang lebih modern dan maju.

Generasi muda sebagai aset dalam masyarakat tidak hanya dilibatkan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tetapi juga dilibatkan untuk pengambilan keputusan sehingga generasi muda mencapai titik

pemberdayaan yang optimal. Generasi muda akan bertransformasi menjadi tokoh-tokoh pembaharuan pada suatu daerah dan membawa masyarakat menuju peradaban yang lebih maju dan modern. Kerangka inilah yang diperlukan untuk meningkatkan kolaborasi peran perempuan dan laki-laki serta kontribusi generasi muda menuju peradaban Indonesia yang lebih baik.

**Hingga saat ini jumlah penduduk dunia di usia 10-24 tahun sebanyak 1,8 miliar orang**



# PETA PROSES BISNIS ORGANISASI

Oleh: Reni M. Surosa

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

REFORMASI BIROKRASI merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan

– 2025 merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu sasaran dalam reformasi birokrasi adalah perubahan proses bisnis/tata laksana, yang didalamnya termasuk prosedur operasi standar baik untuk kementerian/



Gambar 1. Keterkaitan Grand Design Reformasi Birokrasi dengan Road Map Reformasi Birokrasi

tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

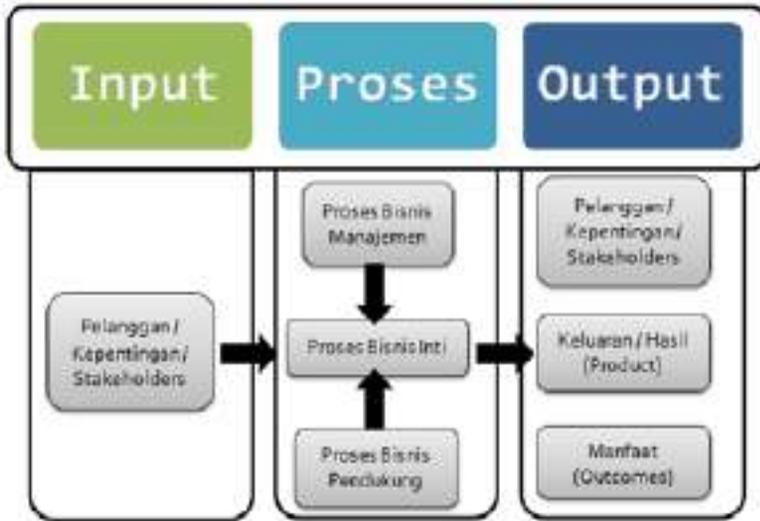
Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010

lembaga di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Pasal 79 menyatakan bahwa Kementerian harus menyusun peta proses bisnis



Gambar 2. Tahapan Lima Tahunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Gambar 3. Pendekatan Penyusunan Proses Bisnis

yang menghubungkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian masing-masing.

Sejalan dengan amanah reformasi birokrasi, Kementerian PAN-RB mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu :

- I. Tahap Persiapan dan Perencanaan  
Langkah awal yaitu mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara langsung ke penanggung jawab proses dan melakukan inventarisasi rencana

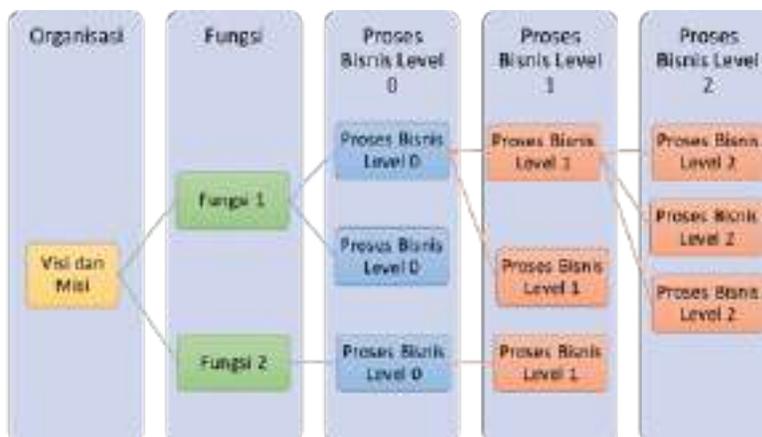


Gambar 4. Value chain diagram analysis dan contohnya pada organisasi KPK

kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui aktivitas (proses kerja) yang ada dalam organisasi. Selanjutnya dilakukan analisa sehingga menghasilkan rumusan peta proses bisnis.

- II. Tahap Pengembangan  
Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan

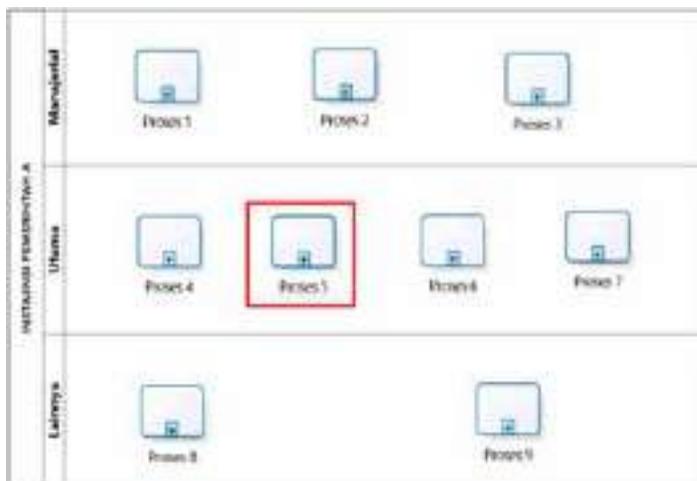
- Level 0  
Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.



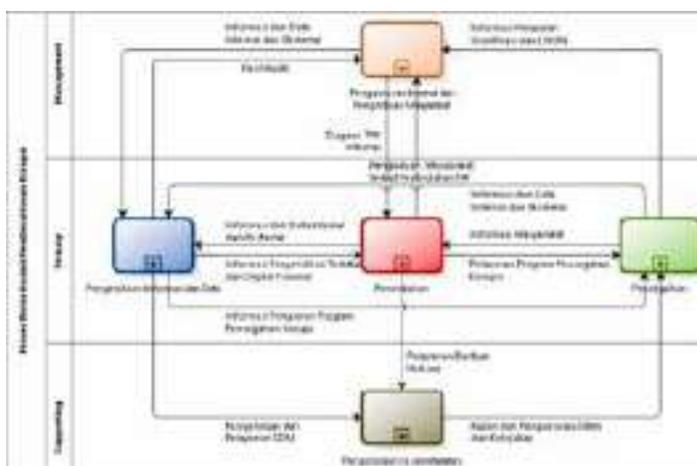
Gambar 5. Struktur hierarki level peta proses bisnis

Pada Proses Bisnis Level 0 KPK, Proses Bisnis Utama terdiri dari Pengelolaan Informasi dan Data, Penindakan, dan Pencegahan; Proses Bisnis Manajemen terdiri dari Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; Proses

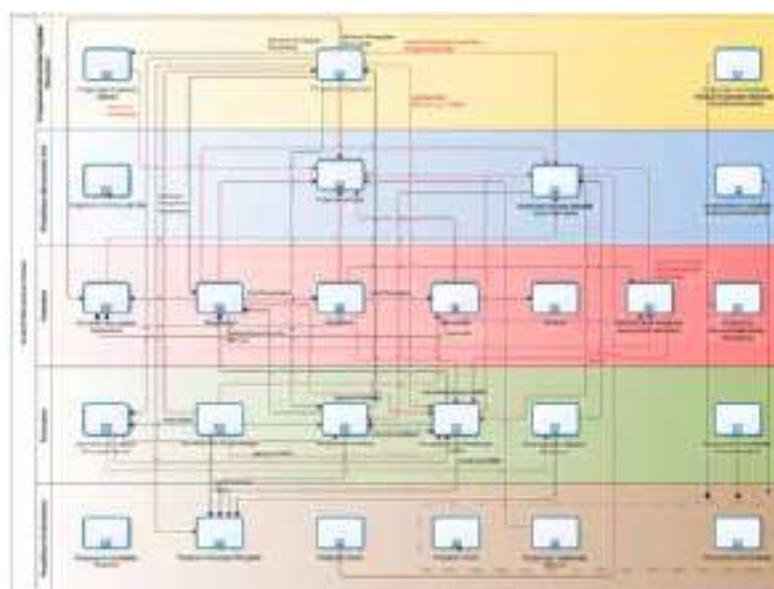
Bisnis Pendukung terdiri dari Pengelolaan Kesekretariatan. Antar Subproses memiliki korelasi dengan ditandai tanda. Proses Bisnis Level 0 ini selanjutnya dikembangkan pada masing – masing subproses yang ada di Level 0. Pada Proses Bisnis Level 0 – 1 KPK, Subproses Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat terdiri dari Subproses Pengelolaan Pengawasan Internal; Pengaduan Masyarakat; dan Pengelolaan Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Pada Subproses Pengelolaan Informasi dan Data terdiri dari Subproses Pengolahan Informasi dan Data; Pelayanan Monitor; Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi; dan Pengelolaan Kesekretariatan Bidang Informasi dan Data. Pada Subproses Penindakan terdiri dari Subproses Koordinasi dan Supervisi Penindakan; Penyelidikan; Penyidikan;



Gambar 6. Contoh Peta Proses Bisnis



Gambar 7. Proses Bisnis Level 0 KPK



Gambar 8. Proses Bisnis Level 0-1 KPK

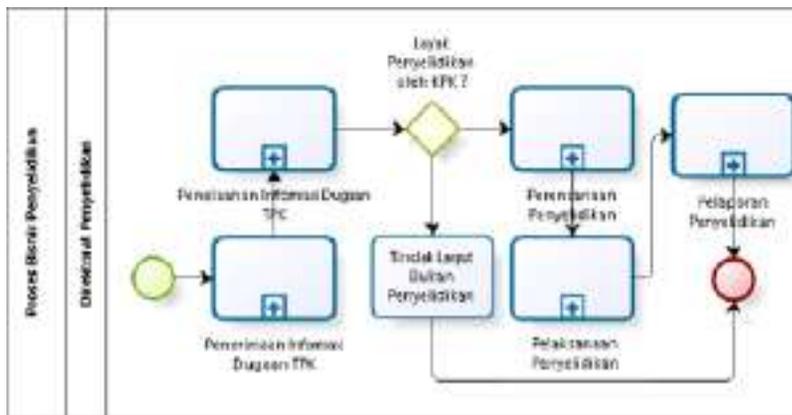
Penuntutan; Eksekusi; Pelacakan Aset Pengelolaan

Barang Bukti dan Eksekusi; dan Pengelolaan Kesekretariatan

Bidang Penindakan.

Pada Subproses Pencegahan terdiri dari Subproses Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi; Penelitian dan Pengembangan; Pengelolaan Gratifikasi; Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN; Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan Pengelolaan Kesekretariatan Bidang Pencegahan. Pada Subproses Pengelolaan Kesekretariatan terdiri dari Subproses Pelayanan Kesekretariatan Pimpinan; Pelayanan Hubungan Masyarakat; Pelayanan Hukum; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Perencanaan dan Keuangan.

- Level 1 Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses



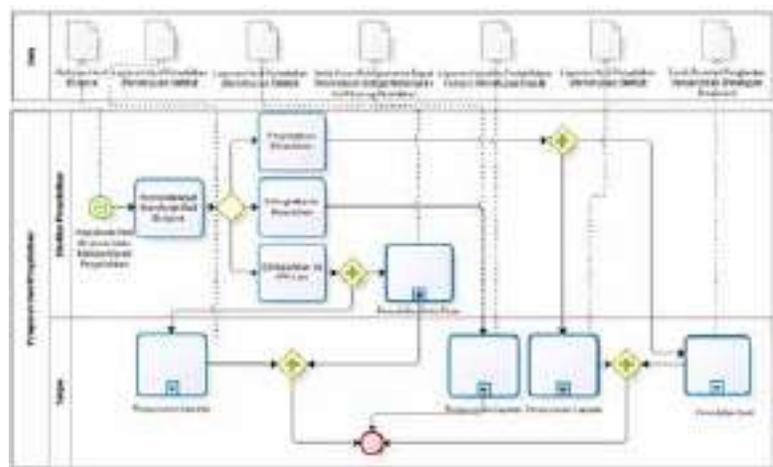
Gambar 9. Proses Bisnis Level 1 KPK : Penyelidikan

bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Pada Proses Bisnis Level 1 KPK diambil contoh isi dari Subproses Penyelidikan menampilkan alur proses yang ada pada Subproses Penyelidikan dengan Aktor/Pelaku adalah Direktorat Penyelidikan.

• Level 2

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1. Pada Proses Bisnis Level 2 KPK diambil contoh isi dari Subproses Pelaporan Hasil Penyelidikan menampilkan alur proses yang ada pada Subproses Pelaporan Hasil Penyelidikan dengan Aktor/Pelaku adalah Direktur Penyelidikan dan Satgas. Pada Subproses ini menampilkan Data/Dokumen yang menjadi output pada masing – masing proses, antara lain : Notulen Hasil Ekspose, Laporan Hasil Penyelidikan, Nota Dinas Pelimpahan ke Deputi Penindakan, Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi, dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan.

III. Tahap Penerapan/Implementasi  
Penerapan peta proses bisnis meliputi : Pengesahan Peta Proses Bisnis (Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan peta



Gambar 10. Proses Bisnis Level 2 KPK

proses bisnis dengan surat keputusan); Pendistribusian Peta Proses Bisnis (distribusi dilakukan melalui *hard copy* dan *soft copy*, dan unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set sebagai master file); Penyimpanan, Penempatan dan Perubahan Peta Proses Bisnis (Peta proses bisnis ditempatkan pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna, bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan memperbaharui dengan dokumen yang baru).

IV. Tahap Pemantauan dan Evaluasi  
Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi

di bidangketalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memacu kinerja yang diharapkan.

Penyusunan peta proses bisnis

merupakan bagian dari penataan tata laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Peta proses bisnis memberikan kemudahan untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.



Gambar 11. Siklus penyusunan proses bisnis

**TANTANGAN** di era globalisasi dan pasar yang kompetitif menuntut daya tahan dan daya saing sebuah kelompok, komunitas, organisasi dan negara dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia sebagai *'intellectual asset'* menjadi salah satu faktor yang penting dalam mendukung produktivitas dan keunggulan kompetitif perusahaan.



## PENYETARAAN KOMPETENSI **TENAGA AHLI SEKTOR KONSTRUKSI** (PROFESI)

Oleh: Siti Afrida, SS. MM. dan Bagoes Wicaksono, S.Kom

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional pada masa Kabinet Kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, serta meminimalisasi ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

"Komitmen mewujudkan Nawacita Presiden RI melalui pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR tahun 2015-2019. Berbagai hasil telah tercapai selama tiga tahun ini, antara lain 39 bendungan (30 baru dan 9 selesai) di mana bendungan yang telah terbangun tersebut menambah

luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 ha (11%) menjadi 859.626 Ha (12,9 %)," ujar Ober Gultom selaku Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian PUPR.

Beliau juga menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol APBN dan non-APBN yang telah terbangun sepanjang 568 kilometer (km) dari target 1.000 km pada akhir 2019 nanti. Lalu, peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum yang telah mencapai 20.430 liter/detik, dan capaian penyediaan perumahan yang telah mencapai 2.204.939 unit. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2019 akan terbangun 1.851 km jalan tol, tersedianya 70.471 liter/detik air bersih melalui pembangunan

Sistem Penyediaan Air Minum, dan lain sebagainya.

"Dengan kondisi ini tentunya dibutuhkan tenaga kerja konstruksi yang andal, berkualitas dalam jumlah yang besar. Upaya sertifikasi merupakan jawaban untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang handal dan berkualitas di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 70 ayat (1) yang berbunyi: Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja," tutur Ober Gultom.

"Ketentuan tentang penggunaan tenaga kerja bersertifikat sudah ada sejak Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999,

tetapi jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat masih sedikit dan kesadaran pelaku jasa konstruksi pun masih rendah untuk menggunakan maupun menyertifikasi tenaga kerja konstruksinya. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa dari sekitar 7 juta tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia, yang memiliki sertifikat baru 10% atau lebih kurang 700 ribu tenaga kerja," tutur Ober Gultom.

Ketentuan bersertifikat ini juga ditekankan dengan adanya kewajiban menggunakan tenaga kerja bersertifikat yang harus tertuang dalam kontrak kerja dan sanksi bagi pengguna atau penyedia jasa yang tidak mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Adanya ketentuan dalam UUKJ Nomor 2 Tahun 2017 memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menekankan pentingnya sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Tentunya komitmen pemerintah tentang sertifikasi tersebut bukan hanya ditujukan sebagai syarat administrasi saja, tetapi juga sebagai bukti kompetensi tenaga kerja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Tidak hanya itu, dengan menggunakan pekerja yang kompeten akan mampu mendukung tercapainya mutu konstruksi dan meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja maupun kegagalan bangunan. Poin penting dari wajibnya tenaga kerja bersertifikat ini juga diperuntukkan agar tenaga kerja mendapatkan manfaat dari sertifikat yang dimilikinya. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, bahwa dengan adanya sertifikat kompetensi kerja maka pendapatan akan meningkat dan memperluas kesempatan kerja tak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri.

Perhatian akan pentingnya standar kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017,

pada Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan: tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi. Sedangkan ayat (2) berbunyi: tenaga kerja konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan: operator, teknisi atau analis, dan ahli.

Adanya ketentuan tersebut dilatarbelakangi perlunya perumusan ulang kerangka kualifikasi tenaga kerja sektor konstruksi agar memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Beberapa kondisi yang terjadi sebelumnya terkait hal ini antara lain tenaga ahli bersertifikat di Indonesia didominasi oleh tenaga ahli muda, sedangkan tenaga terampil bersertifikat di Indonesia didominasi oleh tenaga terampil kelas I. Kemudian, untuk kualifikasi tenaga ahli terutama yang kategori ahli utama, cakupan pekerjaan yang dapat dikerjakan cukup lebar, mulai dari proyek standar sampai dengan kompleks. Hal lain, perlu ada sinkronisasi peraturan mengenai kualifikasi sektor jasa konstruksi yang sesuai dengan dinamika yang berkembang di dunia industri konstruksi saat ini.

Dengan adanya penyesuaian ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan kontribusi

terhadap kesejahteraan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan masyarakat secara keseluruhan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong kualitas tenaga kerja konstruksi, baik kualitas pekerjaan maupun kesejahteraan. Namun di atas semua itu, mutu harus selalu dikedepankan.

Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu saat membuka sertifikasi tenaga kerja konstruksi secara serentak, agar selalu menjaga mutu pekerjaan. Penjaminan mutu tenaga kerja konstruksi dilakukan dengan terus menerus melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengadaptasi perkembangan teknologi terbaru, karena setiap saat teknologi berubah, mengingat kemajuan teknologi sangat cepat berubahnya termasuk konstruksi.

Dengan optimalisasi Program Sertifikasi Profesi, SDM negara kita akan Bangun, Bangkit dan Berkembang, menjadi raja di negara sendiri dan menjadi Mercusuar Dunia untuk segala sektor dan bidang industri di tanah air tercinta Indonesia yang kaya raya dan subur, Indonesia akan kaya profesional yang kompeten di bidang industri masing-masing, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan segera terwujud.

### Kelebihan sertifikasi profesi:

- Memiliki daya saing yang tinggi dalam dunia kerja
- Memiliki kompetensi kerja yang sesuai standar kerja baik nasional, international maupun khusus
- Mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional dan internasional.
- Meningkatkan peluang karir profesional dan meningkatkan kredibilitas orang tersebut
- Menambah wawasan baru yang tidak didapat pada saat menempuh pendidikan formal.
- Dapat meningkatkan posisi dan juga reputasi si profesional tersebut apabila sudah bekerja di dalam sebuah perusahaan.

# Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Proyek Konstruksi Menggunakan Model Kontrak *Cost Plus Fee*

Fadilwansyah Basri<sup>1)</sup>, DR.Ir Andy Tenrisukki Tenriajeng<sup>2)</sup> [ Bagian kedua ]

**PAKAR YANG DIMINTA** pandangan keahliannya terhadap daftar panjang faktor yang mempengaruhi keberhasilan kontrak *cost plus fee*, dirangkum pada Tabel-1.

*project cost* dibatasi pada suatu limit tertentu. Dengan demikian, jumlah variabel yang akan digunakan acuan berkurang dari 16 variabel menjadi 13 variabel.

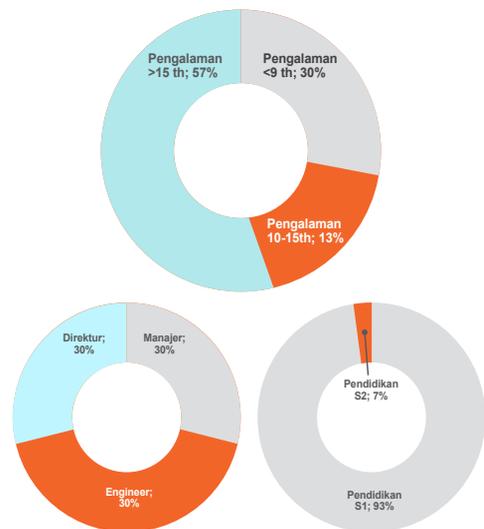
Tabel-1. Profil Pakar

No.	Jabatan	Instansi	Pengalaman	Pendidikan terakhir
P1-1	Manajer Proyek	PT Jagat Konstruksi	24	S1
P1-2	Manajer Proyek	PT Hanawal	20	S1
P1-3	Direktur	PT Jagat Konstruksi	40	S1
P2-1	Enjinir	PT. Idea Five	13	S3
P2-2	Direktur	PT. Jagat Konstruksi	47	S1
P2-3	Direktur	PT. Jagat Konstruksi	40	S1
P2-4	Direktur	PT. Rekaguna Abdidaya	40	S1
P2-5	Manajer	PT. Jagat Konstruksi	25	S1

Catatan: P1-1 Pakar ke-1 Tahap survey ke-1, P2-2 Pakar ke-2 Tahap Survey ke-2

Pengumpulan data tahap 3 dilakukan dengan meyebar kuisisioner kepada 30 responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kuisisioner ini dilakukan untuk mendapatkan data kuantitatif dampak dan frekuensi pengaruh faktor-faktor X1 sampai dengan X16 terhadap kinerja waktu. Profil responden pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar-2. Pada gambar tersebut, berdasarkan pengalaman kerja, terdapat 30% responden dengan pengalaman di bawah 9 tahun, 13% responden dengan pengalaman 10-15 tahun dan 57% dengan pengalaman diatas 15 tahun. Berdasarkan jabatan, terdapat 30% responden yang menjabat sebagai direktur, 30% responden yang menjabat sebagai manajer dan 40% responden menjabat sebagai *engineer*. Berdasarkan latar belakang pendidikan, terdapat 93% responden berlatar belakan pendidikan S1, dan 7% responden berlatar belakang pendidikan S2

Hasil analisis pakar menyimpulkan bahwa hanya 16 dari 32 faktor yang dinilai dapat mempengaruhi keberhasilan proyek dengan kontrak *Cost Plus Fee*. Hasil uji Reliabilitas dan Validitas yang menggunakan analisis statistik menyimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) variabel atau Faktor yang tidak valid sehingga harus dikeluarkan dari data yang akan dianalisis. Variabel tersebut adalah X2 yaitu Risiko tertinggi kontrak *cost plus fee* terdapat pada sistem pemerintahan, X3 yaitu proyek *Cost plus fee* dapat memepererat hubungan kontraktor dan owner, dan X11 yaitu Pembayaran proyek *cost plus fee* dengan sejumlah uang tertentu tetapi total



Gambar-2. Pengelompokan Responden Berdasarkan Jabatan, Pengalaman Kerja dan Latar Belakang Pendidikan

Code	Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kontrak <i>cost plus fee</i>
X2	Risiko tertinggi kontrak <i>cost plus fee</i> terdapat pada sistem pemerintahan
X3	Proyek <i>Cost plus fee</i> dapat memepererat hubungan kontraktor dan owner
X4	Proyek <i>Cost plus fee</i> dapat meningkatkan kepercayaan owner
X5	Proyek <i>Cost plus fee</i> dapat memotong mata rantai birokrasi
X6	Proyek <i>Cost plus fee</i> lebih cepat mengadopsi keinginan owner
X7	Pembayaran dalam proyek <i>Cost Plus Fee</i> bisa dinegosiasikan
X8	Pada proyek <i>cost plus fee</i> , semua material, tenaga kerja, waktu kerja yang digunakan harus disimpan/di-record dengan baik, sebagai dasar perhitungan total biaya kontrak.
X9	Pembayaran proyek <i>cost plus fee</i> dengan persentase dari biaya yang dikeluarkan
X10	Pembayaran proyek <i>cost plus fee</i> dengan sejumlah uang tertentu
X11	Pembayaran proyek <i>cost plus fee</i> dengan sejumlah uang tertentu tetapi total project <i>cost</i> dibatasi padasuatu limit tertentu
X12	Pembayaran proyek <i>cost plus fee</i> dengan sejumlah uang tertentu ditambah bonus apabila proyek selesai lebih cepat atau biaya yang lebih murah
X13	Pembayaran proyek <i>cost plus fee</i> dengan sejumlah uang tertentu, plus pembagian penghematan biaya antara pemilik (user) dan pemborong (contractor)
X14	Hubungan dan komunikasi yang terjalin antara kontraktor, konsultan, dan owner
X15	Gambar-gambar, spesifikasi, dan RAB pada kontrak <i>cost and fee</i> terperinci secara lengkap
X16	Kepastian pembayaran tergantung pada perjanjian kontrak

Tabel-2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Waktu

Analisis ini ditujukan untuk menjawab tujuan penelitian ke-1 penelitian ini yaitu mengidentifikasi Faktor Dominan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Kontrak *Cost Plus Fee*. Input dari analisa faktor dominan kontrak *Cost Plus Fee* adalah variabel-variabel yang sudah diuji validitas dan reabilitas. Dimana nilai rating risiko (frekuensi x dampak) dapat dilihat pada tabel-3.

Tabel-3 Nilai Rata-rata Risiko

No.	Data Frekuensi (Peluang)					Dampak					Nilai Rata-rata		Risiko
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Peluang	Dampak (F)	
X3	0	4	9	11	6	3	5	6	13	3	0,38	0,32	0,073
X4	0	6	8	15	1	4	3	7	15	1	0,3	0,29	0,065
X5	1	2	6	14	7	3	2	6	14	5	0,42	0,37	0,120
X6	0	3	5	14	8	1	4	5	15	5	0,44	0,38	0,087
X7	1	2	7	13	7	2	5	7	12	4	0,42	0,33	0,157
X8	0	0	3	11	16	1	3	4	9	13	0,59	0,51	0,169
X9	0	1	8	10	11	1	5	7	11	6	0,48	0,37	0,138
X10	1	6	10	9	4	1	9	11	7	2	0,32	0,25	0,300
X12	7	2	8	10	3	3	2	5	12	8	0,29	0,42	0,180
X13	8	5	10	6	1	8	4	5	10	3	0,2	0,27	0,079
X14	0	0	8	12	10	2	2	8	8	10	0,48	0,44	0,100
X15	2	1	8	15	4	1	5	5	11	8	0,37	0,41	0,119
X16	0	2	7	9	12	1	1	8	8	12	0,49	0,49	0,056

Kriteria Penilaian Risiko menurut PMBOK 2013 adalah (i) Risiko rendah : 0.01– 0.05, Risiko sedang : 0.06 – 0.19, dan Risiko tinggi : 0.20 – 0.72

Berdasarkan kriteria tersebut, maka variabel dengan kategori “Tinggi” adalah X8 yang menempati peringkat pertama, kemudian variabel X16 yang menempati peringkat kedua dan X14 menempati peringkat ketiga. Dengan demikian, pada proyek *cost plus fee*, semua material, tenaga kerja, waktu kerja yang digunakan harus disimpan/di-*record* dengan baik, sebagai dasar perhitungan total biaya kontrak. Kepastian pembayaran tergantung pada perjanjian kontrak. Hubungan dan komunikasi yang terjalin antara kontraktor, konsultan, dan *owner*.

Analisis peningkatan manfaat kontrak *Cost Plus Fee* menggunakan analisis statistik, khususnya korelasi dan regresi faktor. Analisis ini ditujukan untuk menjawab tujuan penelitian ke-2 yaitu adalah “memberikan gambaran bahwa dengan sistem kontrak *cost plus fee* bisa memotong mata rantai sehingga waktu penyelesaian bisa lebih cepat dan mampu mengadopsi keinginan *owner* secara langsung. Hipotesisnya adalah bahwa kemampuan memotong mata rantai dan kemampuan mengadopsi keinginan *owner* dapat mengurangi risiko variabel yang termasuk kategori berisiko tinggi. Selanjutnya, apabila risiko penggunaan kontrak *cost plus fee* dapat dikurangi, maka kinerja penyelenggaraan proyek dapat ditingkatkan.

	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X12	X13	X14	X15	X16
X3	1	,789**	,632**	,409*	,322	,564**	,509**	,260	,520**	,250	,426*	,273	,446*
X4	,789**	1	,608**	,518**	,330	,459*	,527**	,174	,358	,312	,356	,177	,340
X5	,632**	,608**	1	,583**	,423*	,517**	,315	,124	,467**	,372*	,436*	,331	,398*
X6	,409*	,518**	,583**	1	,679**	,626**	,488**	,390*	,282	,293	,325	,046	,260
X7	,322	,330	,423*	,679**	1	,721**	,597**	,532**	,212	,277	,396*	,133	,390*
X8	,564**	,459*	,517**	,626**	,721**	1	,726**	,535**	,526**	,366*	,555**	,469**	,563**
X9	,509**	,527**	,315	,488**	,597**	,726**	1	,499**	,295	,312	,442*	,107	,485**
X10	,260	,174	,124	,390*	,532**	,535**	,499**	1	,418*	,279	,026	,026	-,022
X12	,520**	,358	,467**	,282	,212	,526**	,295	,418*	1	,759**	,278	,536**	,147
X13	,250	,312	,372*	,293	,277	,366*	,312	,279	,759**	1	,286	,352	,027
X14	,426*	,356	,436*	,325	,396*	,555**	,442*	,026	,278	,286	1	,329	,790**
X15	,273	,177	,331	,046	,133	,469**	,107	,026	,536**	,352	,329	1	,341
X16	,446*	,340	,398*	,260	,390*	,563**	,485**	-,022	,147	,027	,790**	,341	1

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar-5 Matrik Korelasi Variabel variabel yang mempengaruhi keberhasilan kontrak *cost plus*

Analisis korelasi antara variabel berisiko tinggi dengan variabel berisiko sedang dilakukan untuk memberi gambaran adanya hubungan atau keamatan hubungan secara tidak langsung (Gambar-5).

Berdasarkan Gambar-5 tersebut, variabel X8 berkorelasi positif dan kuat dengan 10 (sepuluh) dari 13 (tiga belas variabel yang mempengaruhi keberhasilan kontrak *cost plus fee*). Sementara itu, X14 hanya berkorelasi positif dan kuat dengan 2 (dua) dari 13 (tiga belas), sedangkan variabel X16 berkorelasi positif dan kuat dengan 3 (tiga) dari 13 (tiga belas).

Hal tersebut, membuktikan bahwa X8 memiliki keamatan hubungan terhadap sebagian besar variabel lain yang mempengaruhi keberhasilan kontrak *cost plus fee*, tanpa memperhatikan hubungan kausal diantara variabel variabel tersebut. Hubungan kausal dijelaskan dengan model regresi yang menggunakan analisis faktor.

Hubungan korelasional tersebut akan berpengaruh pada hasil pemodelan regresi berganda konvensional yaitu multikolinieritas. Oleh karena itu, untuk menghilangkan pengaruh multikolinieritas tersebut, digunakan analisis faktor, dan model regresi berganda yang terbentuk disebut regresi faktor.

Analisis faktor dilakukan dengan memperhatikan beberapa asumsi atau kriteria yaitu, diawali dengan Uji *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)* dan *Bartlett's* untuk menguji kecukupan data secara menyeluruh. Selain itu, kriteria *Measures of Sampling Adequacy (MSA)* yaitu atau pengukuran kecukupan data secara parsial. Uji lainnya adalah uji komunalitas yaitu kemampuan variabel menjelaskan faktor nya, *eigenvalue* yang menjadi dasar pembentukan faktor dan % of variance yaitu kemampuan varians menjelaskan faktornya. Hasil uji tersebut adalah  $KMO = 0,708 > 0,5$ ,  $MSA$  enam variabel yang telah layak dianalisis menggunakan analisis faktor, seluruhnya  $> 0,5$  (minimum = 0,578 dan maksimum = 0,797). (*bersambung*)

# PEMBERDAYAAN DALAM RANGKA MENDORONG SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI MELALUI PROGRAM BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA

Oleh: Supoyo, S.T., M.T



**RUMAH MERUPAKAN** salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Wilayah Indonesia.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor.1/2011 Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah yang layak, salah satu sarannya adalah Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR), berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Program BSPS, merupakan salah satu program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang konstruksi, dengan sasaran program untuk memenuhi kebutuhan papan (rumah) layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program strategis untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR pada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, sesuai dengan alokasi kegiatan, tergambarakan bahwa setiap tahunnya, jumlah bantuan stimulan perumahan swadaya yang terakolasikan di berbagai desa maupun kelurahan yang tersebar di setiap kabupaten/kota/ propinsi seluruh Indonesia, merupakan program dan kegiatan yang bersifat sangat signifikan, baik dilihat dari aspek manfaat, persebaran, mekanisme pelaksanaan, jenis kegiatan, sasaran, dan persfektif untuk mendorong sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) di daerah perdesaan, khususnya.

Prinsip dalam penyelenggaraan BSPS di lapangan, masyarakat penerima bantuan berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Dengan kemajemukan berbagai kondisi penerima program BSPS,

tentu untuk membangun satu sasaran terbangunnya rumah layak huni, peran tenaga pendamping masyarakat penerima bantuan sangat besar andilnya dalam mewujudkan output sasaran. Artinya peranan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang merupakan tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan (PB) dalam melaksanakan kegiatan BSPS adalah sangat strategis keberadaannya. Sehingga TFL dapat dikatakan sebagai ujung tombak dalam menggerakkan dan

Tahun	Jumlah (Unit)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dana (Rp)	Ongkos Tukang (Rp.)
2018		33 Propinsi, 398 kab/kota, 1916 kecamatan, dan 5.562 Desa/ Kelurahan.	PBRS : 30 Juta PKRS : 15 Juta	PBRS : 5 Juta PKRS : 2,5 Juta
2019		33 Propinsi, 353 kab/kota, 2094 kecamatan, dan 6.235 Desa/ Kelurahan (* SK Tahap1). Jumlah bantuan 205.500 unit	PBRS : 35 Juta PKRS : 17,5 Juta	PBRS : 5 Juta PKRS : 2,5 Juta

memampukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam pelaksanaan kegiatan di setiap lokasi yang telah ditetapkan, sesuai dengan proporsi tugas yang diamanahkan setiap TFL. Di sisi lain, program BSPS berupaya mendorong prakarsa masyarakat agar memiliki kemampuan dalam perencanaan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya, dalam hal ini diperuntukkan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni.

Dilihat dari jenis kegiatan, program BSPS meliputi ; a) Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS), yaitu kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni, dan b) Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) yang layak huni. Masing-masing kegiatan mempunyai besaran alokasi dana yang berbeda. Sebagai gambaran alokasi program dan kegiatan tahun 2018 dan 2019 sebagaimana tabel berikut :

Mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemberdayaan berbasis masyarakat, bila dikaitkan dengan target sasaran program sebagai upaya mendorong terwujudnya rumah layak huni dan kebutuhan akan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) kompeten, hal ini dapat dipandang sebagai hal yang sangat strategis untuk “pengungkit “ dan upaya terpenuhinya TKK Kompeten secara bertahap di perdesaan/kelurahan kedepan. Paralel dengan sasaran (output), bahwa untuk menyiapkan rumah layak huni, mau tidak mau atau langsung tidak langsung

dibutuhkan tenaga tukang yang mumpuni dan kompeten. Sehingga *Output* rumah layak huni atau kelayakan bangunan dapat dilihat dari aspek : penilaian komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap, dan kualitas bahan/material), penilaian kesehatan penghuni (pencahayaannya, penghawaannya dan ketersediaan MCK, serta penilaian kecukupan minimum luas bangunan dapat terpenuhi. Hal sesuai UU Nomor.2/2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah mengamanahkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi (TKK) wajib memiliki sertifikat kompetensi untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi (sesuai pasal 70 ayat 1), artinya tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada bidang konstruksi wajib mempunyai sertifikat bidang konstruksi sebagai pengakuan kompetensi yang dimiliki.

Untuk terwujudnya rumah layak huni dan mendorong sertifikasi kompetensi pada sasaran program ini, TFL bersama dengan KPB merupakan ujung tombak untuk implementasi di lapangan. Dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan, TFL harus dapat menjalankan tugas secara profesional, yang dimulai dari persiapan, pemberdayaan, pelaksanaan, dan rekrutmen/ memilih tukang konstruksi benar-benar didapatkan tukang yang mumpuni dan kompeten dalam rangka penjaminan mutu. Bila tukang konstruksi di desa/kelurahan yang telah dipilih sebagai leader pelaksana pekerjaan belum memiliki sertifikasi kompetensi, opsi selanjutnya di dalam pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilakukan asesmen uji kompetensi melalui *On Job Training (OJT)* pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Inilah pentingnya peran TFL di lapangan dapat mensosialisasikan secara maksimal urgensinya tukang yang kompeten, sesuai amanah UU Nomor. 2/2017 Pasal 70 ayat 1, dimana setiap tenaga konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Peluang untuk mendorong pelaksanaan sertifikasi tukang konstruksi pada program ini sangat besar, apalagi program ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan persebarannya sampai pelosok desa/kelurahan di Indonesia. Dengan memanfaatkan momentum pada program BSPS, bila setiap pelaku (stakeholders) bersinergi dan komitmen secara berkelanjutan untuk melaksanakan uji kompetensi tukang konstruksi yang tersebar diberbagai perdesaan, ada suatu keyakinan tenaga tukang konstruksi yang kompeten akan muncul dan eksis di wilayah perdesaan secara bertahap dan masif. Sebagai gambaran, dengan memperhatikan alokasi kegiatan program perumahan swadaya tahun 2019 (pada tabel di atas), jumlah alokasi penerima bantuan 205.500 unit. Dengan asumsi bila 1 (satu) unit bantuan stimulan swadaya dibutuhkan 1(satu) orang tukang, maka jumlah tukang yang akan tersertifikasi sebanyak 205.500 orang. Sebaliknya bila diasumsikan setiap unit rumah swadaya dibutuhkan 2 (dua) orang tukang, maka diperkirakan jumlah tukang yang akan tersertifikasi sebanyak 411.000 orang tukang, dan potensi persebaran tukang konstruksi yang tersertifikasi akan tersebar di 6.235 perdesaan/kelurahan. Bisa kita bayangkan, bila pelaksanaan sertifikasi via program ini dapat dilaksanakan 5 (lima) tahun berturut-turut kedepan. Luar biasa bukan potensi dan jumlah tukang yang dapat disertifikasi pada pelaksanaan kegiatan ini.#



**Oleh: Meylina Hasbullah**

Familiar dengan budaya April Mop? Singkatnya, budaya dari barat ini dikenal juga dengan sebutan *April Fools' Day*, diperingati setiap tanggal 1 April setiap tahun dengan memperbolehkan orang memberi lelucon kepada orang lain atau berbohong tanpa dianggap bersalah. Hanya untuk tertawa bersama tujuannya.

Banyak film blockbuster dan serial yang layak ditunggu-tunggu di April ini, ada *Game of Thrones*, *Endgame Avengers*, Trilogi John Wick. Sebagian besar final, dan ditunggu oleh fans nya sejak lama.

Di bulan yang sama, setelah ditunggu sekian lama, Indonesia menyelenggarakan Pemilu (Pemilihan

Umum) secara serentak untuk pimpinan tertinggi dari Eksekutif dan Legislatif. Pemilu serentak ini pertama kalinya diadakan dan merupakan tonggak sejarah, pemilu terbesar yang pernah ada di seluruh dunia. Banyak mata internasional melihat Indonesia, mempelajari proses yang terjadi maupun dampaknya.

Sejak akhir tahun 2018 persiapan untuk pemilu telah berjalan dengan lebih massif, demikian pula dengan informasi yang mengitarinya. Beragam wujud bentuknya informasi tersebut, untuk memberikan pencerahan maupun malah menggiring ke opini tertentu. Ada yang fakta ada juga yang hoax. Puncaknya di bulan April 2019, informasi benar-benar berseliweran di jagat maya.

Tergantung masyarakat hendak mempercayainya atau tidak.

Bagaimana kita bisa menyikapi suatu informasi berupa fakta atau tidak? Bila tidak kritis, bisa jadi malah ikut menyebarkan informasi yang belum tentu fakta tersebut. Tadinya saya berpikir tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, latar belakang mempengaruhi ini. Ternyata tidak juga. Manusia memang memiliki kedalaman hati dan pikiran yang luar biasa. Kedewasaan individu menjadi hal yang patut dipelajari.

Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain juga mengalami berseliwerannya fakta dan hoax ini. Serba digital mengakibatkan begitu mudahnya komunikasi, berbagi informasi tanpa melalui lapisan persetujuan yang dulunya terjadi karena perbedaan waktu, lokasi, maupun teknologi.

Terjadinya Revolusi Industri 4.0, ditandai dengan mengedepkannya layanan berbasis internet, *internet of things*, dan *cloud computing*.

Sejalan dengan perkembangan industri 4.0 tersebut, Kementerian PUPR mulai melakukan perubahan dalam

proses bisnisnya melalui digitalisasi, *connectivity and computer power*, *human-machine interface*, *analytics intelligent* yang memberi nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Beriringan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengalami restrukturisasi organisasi yang berperan besar dalam *output outcome* nantinya. Perkembangan tugas dan fungsi sebagai pembina jasa konstruksi menjadi semakin luas. Diperlukannya sistem informasi berupa basis data yang akurat agar para pembuat keputusan dapat menggunakan wewenangnya secara tepat sasaran.

Data yang akurat perlu cakupan *source* efektif dalam perjalanannya. Perlu waktu untuk mendapatkan, mengolah maupun mempublikasikan data pembinaan jasa konstruksi tersebut. Sistem yang matang menghadirkan informasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.

'April Mop' sudah berakhir, Kawan. Kita sudah tertawa dan menangis bersama. Saatnya kembali bersatu, membangun negeri. (\*\*\*)



<https://www.cincinnati.com/story/entertainment/2019/04/01/april-fools-day-2019-best-pranks-cincinnati/3330288002/>

# GAME S

## Susunlah istilah di bawah ini agar menjadi istilah yang benar pada pekerjaan bidang Konstruksi!

1. Suatu sarana pembantu struktur beton untuk pencetak beton yang sesuai dengan ukuran, bentuk, rupa, ataupun posisi yang direncanakan

G E N T I K I S B

2. Campuran antara semen portland atau semen hidraulik yang lain, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau tanpa bahan tambahan membentuk masa padat

T O B E N

3. Suatu struktur (kerangka) sebagai salah satu sarana kerja bagi pekerja untuk melakukan tugas pada ketinggian tertentu dan penyangga acuan beton yang berfungsi mencegah terjadinya perubahan posisi acuan dari posisi yang telah ditentukan.

F A S C O L F D I N G

4. Beton yang kelebihan air sehingga menyebabkan air semen naik ke permukaan

L E D E I N B G

5. Pengelompokan agregat yang homogen pada adukan beton, dimana agregat kasar terpisah dengan agregat halus

G E R S A G I S E

6. Alat Uji Kekentalan/konsistensi beton

L U M P S

7. Truck yang mampu mengaduk Beton

T C R E K U X M I X

8. Menahan atau membendung adukan beton sehingga tidak tercampur lingkungan (tanah, sungai, dan sebagainya)

C A F R A M O F D

9. Batang baja berbentuk polos atau defon atau pipa yang berfungsi untuk menahan gaya tarik pada komponen struktur, tidak termasuk tendon prategang, kecuali bila secara khusus diikutsertakan.

A N G N A L U T

10. Lokasi atau tempat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan fabrikasi

S H O P R K O W





## Kuisiner Tentang Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi

### I. Data Responden

- 1. Usia : \_\_\_\_\_
- 2. Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_
- 3. Unit Organisasi : \_\_\_\_\_

### II. Petunjuk Pengisian

- 1. Kuisiner ini semata-mata untuk keperluan perbaikan dalam setiap edisi Buletin
- 2. Bacalah dan jawablah pertanyaan di bawah ini, sesuai dengan yang Anda ketahui
- 3. Berikan tanda (√) pada jawaban pada kolom YA/TIDAK

	YA	TIDAK
1. Apakah Anda membaca Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Apakah informasi yang diberikan Bermamfaat?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Apakah materi yang dibahas menarik?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Apakah kualitas design cover Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi menarik?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Apakah kualitas design materi Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi menarik?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Apakah kuantitas materi dalam Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi perlu ditambahkan?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Apakah konten dalam Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi menarik?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Apakah penerbitan Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi tepat waktu?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Apakah distribusi Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi perlu ditambahkan di setiap edisi?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Apakah Anda tertarik untuk memberikan materi tambahan dalam Buletin Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### 4. Berikan Saran/Kritik Anda :

.....

.....

.....

.....

Kirimkan Jawaban Anda dengan cara mengunjungi Website <http://bit.ly/ganebuletinditjenbina> atau scan Barcode di samping ini.

20 Pengirim terpilih akan mendapatkan singkapan menarik dari internal buletin DUK






**Selamat**

***Hari Raya***  
***Idul Fitri 1440 H***

**Mohon maaf Lahir & Bathin**